



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARULIAN NOVIANDRI
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 194496

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.426.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/150 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
3. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.092.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SRZ Tahun 2022, LAINNYA Rp. 580.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 101.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.177.209.163**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.796.209.163



III. HUTANG

Rp.

635.190.312

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.161.018.851

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.